



**PUTUSAN**

**Nomor/Pdt.G/2024/PA.Smp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3529112109980002, tanggal lahir 21 September 1998 /umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Nong Pote RT. 002 RW.003 Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Jawa Timur,, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SYAIFUL BAHRI, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln Slamet Riadi No. 20 Pabian Sumenep berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 489/Kp/2024/PA.Smp tanggal 24 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK 3509306110010004, tanggal lahir 21 Oktober 2001 /umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN JEMBER JAWA TIMUR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juli 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 983/Pdt.G/2024/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 983/Pdt.G/2024/PA.Smp, tanggal 24 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami Istri sah menikah pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 yang dicatat oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo Kabupaten Jember sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomer : 0655/012/X/2022, tertanggal 04 Oktober 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon Rukun harmonis tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Nong Pote RT.002/RW.003 Desa Pragaan Daya Kecamatan Peragaan Kabupaten Sumenep;
3. Bahwa setelah Pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, awalnya kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis namun sejak 10 (sepuluh) yang lalu sekira bulan Oktober 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perkecokan kesalah pahaman yang berujung pada pertengkaran;
5. Bahwa kejadian tersebut tidak hanya sekali namun terus menerus hampir tiap saat pertengkaran itu berulang adapun permasalahan yang menyebabkan pertengkaran adalah Termohon meminta pulang ke Jember namun Pemohon menolak hingga permasalahan memuncak yang pada akhirnya Pemohon bersama orang tua Pemohon sepakat mengantarkan Termohon ke orang tuanya di Jember untuk mencegah agar Termohon tidak minggat dari Rumah Pemohon;
6. Bahwa sekira 8 (delapan) bulan yang lalu tepatnya desember 2023 Pemohon dengan orang tua Pemohon mengantarkan Termohon sesampai di perjalanan (pamekasan) Termohon mengatakan kepada termohon bahwa Orang tuanya (ayah) sedang menjemput Termohon dan juga sudah nyampai pamekasan, orang tua Pemohon mengatakan kalau begitu kita pulang ke Sumenep dan bertemu di Sumenep dulu, namun Orang Termohon melalui Termohon Menolak dan mengatakan ketemu di Pamekasan saja;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 983/Pdt.G/2024/PA.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah bertemu di Pamekasan orang Termohon langsung membawa Termohon Pulang ke Jember sehingga Pemohon dengan orang tua Termohon Tidak bisa berbuat apa-apa dan Pulang ke Sumenep;
8. Bahwa atas peristiwa tersebut Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersama lagi Pisah Tempat Tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, tepatnya sejak bulan Desember 2023 sampai dengan surat Permohonan Cerai Talak ini diajukan ke Pengadilan Agama Sumenep;
9. Bahwa, oleh karena ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan karena tidak ada keharmonisan selalu bertengkar dan pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal tidak bersama lagi selama kurang lebih 8 (delapan)bulan, dan termohon sudah mengabaikan kewajiban sebagaimana layaknya seorang isteri, yang demikian sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomer 1 tahun 1974, jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 9, Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 serta yurisprudensi yang berlaku dibenarkan adanya Perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan cerai talak dari Pemohon secara keseluruhan
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (ANSORI BIN AKLAN) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (LISA OKTIANA PUTRI) dihadapan Sidang Majelis Pengadilan Agama Sumenep.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku,
4. Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pandangan hukum lain mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada SYAIFUL BAHRI, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jln Slamet Riadi No. 20 Pabian Sumenep berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 489/Kp/2024/PA.Smp tanggal 24 Juli 2024;

Halaman 3dari 12halaman, Putusan Nomor 983/Pdt.G/2024/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANSORI, NIK 3529112109980002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelel serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0655/012/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelel serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 983/Pdt.G/2024/PA.Smp



- . SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 04 Oktober 2022;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir tahun 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi tahu penyebab pertengkaran karena Termohon berulang kali minta pulang ke rumah orangtua Termohon di Jember;
  - Bahwa, akibat pertengkaran tersebut saksi mengantarkan Termohon pulang ke Jember, namun sesampai di Pamekasan Termohon turun dari mobil dan menyampaikan bahwa orangtua Termohon sudah menjemput dan sudah sampai di Pamekasan;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 8 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
- . SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir tahun 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu penyebab pertengkaran karena Termohon berulang kali minta pulang ke rumah orangtua Termohon di Jember;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut orangtua Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke Jember, namun sesampai di Pamekasan Termohon turun dari mobil dan menyampaikan bahwa orangtua Termohon sudah menjemput dan sudah sampai di Pamekasan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 8 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, orangtua Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 983/Pdt.G/2024/PA.Smp



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 23 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 489/Kp/2024/PA.Smp tanggal 24 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelendan* cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Sumenep, namun Termohon meminta pulang ke Jember. Berdasarkan tempat tinggal terakhir, terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal Bersama, oleh karenanya Pengadilan Agama Sumenep berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 04 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 983/Pdt.G/2024/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak akhir tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon minta pulang ke Jember;
2. Bahwa, 8 bulan yang lalu orangtua Pemohon mengantar Termohon pulang ke Jember namun sesampai di Pamekasan Termohon telah dijemput oleh orangtua Termohon;
3. Bahwa akibat sejak 8 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi dan tidak

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 983/Pdt.G/2024/PA.Smp



melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Artinya: *“ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”*. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 983/Pdt.G/2024/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag., M.H.sebagai Ketua Majelis, Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.dan Hirmawan Susilo, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 983/Pdt.G/2024/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dan dibantu oleh Moh. Hasyim, S.H. sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;  
Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Hasyim, S.H.

## Perincian Biaya:

. Pendaftaran	: Rp.	.000,00
. Proses	: Rp.	.000,00
. Panggilan	: Rp.	.000,00
. PNBP Panggilan	: Rp.	.000,00
. Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
. Redaksi	: Rp.	.000,00
. Meterai	: Rp.	<u>.000,00</u>
Jumlah	Rp.	2.000,00

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 983/Pdt.G/2024/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)